

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM UPAYA MENGURANGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI SMP N 1 PONCOWARNO

Implementation of The Smart Indonesian Card (KIP) Policy in an Effort to Reduce Children Who Drop Out of School at SMP N 1 Poncowarno

Oleh: Vikin Ade Saputri, Universitas Negeri Yogyakarta
Vikin.ade2016@sudent.uny.ac.id

Abstrak

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam mengurangi anak putus sekolah di SMP N 1 Poncowarno, 2) Dampak dari implementasi Kartu Indonesia Pintar dalam upaya mengurangi anak putus sekolah di SMP N 1 Poncowarno, dan 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan KIP di SMP N 1 Poncowarno. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah staf bidang perencanaan dinas Kabupaten Kebumen, Kepala sekolah, pengelola KIP sekolah, siswa penerima KIP, orang tua penerima KIP, serta peserta didik yang mengalami putus sekolah. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yaitu analisis interaktif. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kartu Indonesia Pintar dikomunikasikan melalui sosialisasi secara rutin. Sumberdaya peralatan mendukung seperti komputer dan *wi-fi*. Jumlah pengelola disekolah dirasa kurang. Sekolah berperan sebagai penanggung jawab. 2) KIP belum maksimal mengurangi APS. 3) Faktor pendukung: komunikasi, koordinasi, sosialisasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan, serta sarana prasarana yang mendukung. Faktor penghambat: kurang tenaga pengelola, kelalaian siswa dan tidak tepat sasaran.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, Anak Putus Sekolah

Abstrack

The Smart Indonesia Card Policy in reducing the number of children who drop out of school is not optimal. The purposes of this research are to describe: 1) The implementation of the Smart Indonesia Card Policy in reducing the number of children who drop out of school at SMP N 1 Poncowarno, 2) The impact of the implementation of the Smart Indonesia Card in an effort to reduce the number of children who drop out of school at SMP N 1 Poncowarno, and 3) Factors that support and hinder the implementation of KIP policies at SMP N 1 Poncowarno. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The subjects of this research were staff of the Kebumen district office planning, school principals, school KIP managers, students of KIP recipient, parents of KIP recipients, and students who had dropped out of school. The data analysis technique used Milles and Huberman's model, namely interactive analysis. The data validity used source and technique triangulation. The results showed: 1) Smart Indonesia Cards are communicated through regular socialization. Supporting equipment resources are computers and Wi-Fi. The number of managers at school is deemed insufficient. School plays a role as the person in charge. 2) KIP has not maximally reduced APS. 3) Supporting factors: good communication, coordination, socialization and cooperation among policy implementers,

as well as supporting facilities. The inhibiting factors are lack of management personnel, student negligence and not being on target.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Card, children who drop out of school

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap warga Negara Indonesia. Dengan pendidikan, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, dimana akan lebih terpolanya anak bangsa untuk dapat meningkatkan kemampuan agar dapat memajukan kualitas anak Indonesia. Dewi,dkk. (2014) pendidikan merupakan serangkaian proses yang dilakukan suatu negara dalam rangka menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan.

Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk memajukan bangsa agar lebih siap

menghadapi tantangan di era global. Pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua. Konsep pendidikan untuk semua berarti mengupayakan agar setiap warga Negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan.

Pemerintah mengeluarkan wajib belajar yang dimana program tersebut merupakan program pendidikan minimal yang harus dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia untuk mengupayakan pemerataan pendidikan. Namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai (Rohman, 2009 : 245). Dalam pelaksanaan program wajib belajar belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat kendala yaitu terdapatnya anak putus sekolah. Terdapat beberapa penyebab dari putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak, peserta didik yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan

masyarakat menengah ke bawah. Biaya yang dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya bukan hanya sekedar biaya iuran sekolah, tetapi juga seragam, alat tulis, uang saku, transportasi dan keperluan yang lainnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya angka putus sekolah.

Data mengenai anak putus sekolah di Kabupaten Kebumen berdasarkan lansiran www.kebumen.sorot.com, Catatan Dinas Pendidikan, pada tahun 2016 jumlah anak putus sekolah atau belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun hanya sebanyak 302 anak. Sedangkan pada 2015, jumlah itu sebanyak 332 anak. Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat ada 192 anak putus sekolah. Berdasarkan Laporan kinerja Pemda Kabupaten Kebumen tahun 2019, anak putus sekolah di Kabupaten Kebumen pada usia 7-12 tahun, atau setara dengan SD/MI pada tahun 2019 mencapai angka 71 anak putus sekolah. Kemudian pada usia 13-15 tahun, atau setara dengan SMP/MTS pada tahun 2019 mencapai angka 123 anak putus sekolah.

Berdasarkan data dari KEMENDIKBUD, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada jenjang SMP pada tahun 2017 di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan, dimana APK pada tahun 2016 mencapai angka 70.32% menurun menjadi 69.35%. Penurunan tersebut terus terjadi hingga

tahun 2019 dimana angka partisipasi kasar di Kabupaten Kebumen hanya mencapai 68.42%. Serta APM pada tahun 2016 mencapai angka 53.68% dan menurun menjadi 52% pada tahun 2018. Namun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2019 dimana angka partisipasi murni mencapai 53.99%.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya anak putus sekolah dan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Kebumen pada jenjang SMP/MTS yang masih sangat jauh dari harapan pemerintah. Hal ini masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah untuk menekan angka anak putus sekolah serta meningkatkan angka partisipasi di Kabupaten Kebumen.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program

Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. PIP menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan pelatihan).

Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan KIP diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas.

Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini

merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diberikan langsung kepada siswa dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain-lain. Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional.

SMP N 1 Poncowarno merupakan salah satu sekolah yang memiliki siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 terdapat 10 siswa yang mengalami putus sekolah di SMP N 1 Poncowarno. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi. Program Indonesia Pintar melalui Kartu

Indonesia Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan untuk menekan anak putus sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata. Selanjutnya, apabila dilihat dari permasalahan yang diteliti maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, melaporkan keadaan objek atau subjek yang teliti sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2005: 157). Sedangkan menurut Moleong (2010:6) hasil dari penelitian deskriptif kualitatif nantinya dideskriptifkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu, subyek yang diperlukan pada penelitian ini adalah Staf Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang mengurus Kartu Indonesia Pintar, Kepala Sekolah, pengelola KIP sekolah, siswa yang mengalami putus sekolah, siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta orang tua siswa. Objek penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan KIP dalam upaya mengurangi anak putus sekolah di SMP N 1 Poncowarno.

Setting Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Tempat penelitian tergantung pada bidang ilmu yang melatarbelakangi studi tersebut. *Setting* pada penelitian haruslah jelas sehingga dapat melakukan penelitian dengan efektif dan akurat (Sukardi, 2005: 53).

Menurut Bungin (2001: 148) penentuan tempat dan waktu penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selanjutnya,

dipertimbangkan apakah lokasi dan *setting* penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yaitu SMP N 1 Poncowarno. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak penyusunan proposal pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2020. Alasan pemilihan sekolah tersebut karena jumlah masih terdapatnya anak putus sekolah pada tahun 2019, sedangkan SMP N 1 Poncowarno juga merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam keadaan alamiah (*setting natural*), menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2010 : 308).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah

(Arikunto, 2002: 136). Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dan dibantu dengan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga mudah dipahami. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan Data

Moleong (2009: 324) untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk menjaga keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Meleong (2009:330) mengungkapkan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan *cross check*, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti yakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan. Triangulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah di SMP N 1 Poncowarno

Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2015. Kartu Indonesia Pinta (KIP) merupakan perluasan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan sekaligus mendorong rintisan wajib belajar 12 tahun. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak/kurang mampu dalam membiayai pendidikan anak. Pemerintah

memberikan bantuan ini bertujuan untuk membantu biaya operasional. Adanya Kartu Indonesia Pintar, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa bersekolah, mampu mencegah siswa yang memiliki kemungkinan putus sekolah serta mampu menarik kembali anak putus sekolah untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan KIP dalam upaya mengurangi anak putus sekolah di SMP N 1 Poncowarno peneliti mengacu pada aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi dan birokrasi sesuai dengan teori Edward.

Komunikasi kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan dalam sebuah implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, memahami, tujuan arah dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan sendiri meliputi tiga dimensi yaitu, dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi.

KIP dikomunikasikan oleh Dinas Kabupaten kepada Sekolah melalui sosialisasi. Dinas Kabupaten menyampaikan materi mengenai KIP sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pusat. Materi yang diberikan kepada

sekolah lengkap dan dapat diterima oleh sekolah dengan baik. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin satu tahun sekali oleh dinas daerah untuk membahas mengenai prosedur KIP, hingga pencairan dana KIP. Pemerintah pusat juga memberikan aplikasi Sipintar guna membantu mempermudah para pengelola dalam menerima informasi lebih rinci. Sasaran yang diundang dalam sosialisasi yang dilakukan oleh dinas daerah adalah para operator yang ditunjuk sekolah untuk mengelola KIP.

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas, mereka mengundang langsung para operator sekolah yang memang mengelola KIP di sekolah masing-masing sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi antar pengelola. Dengan tersebut, pengelola sekolah dapat menyampaikan secara jelas kepada kelompok sasaran yaitu peserta didik. SMP N 1 Poncowarno mensosialisasikan KIP kepada peserta didik dengan mengumpulkan peserta didik secara langsung. Sebelum adanya pandemi, sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa setiap awal semester. Siswa diberitahukan secara detail mengenai KIP, prosedur, syarat, pencairan hingga pemanfaatan dana. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam dimensi transmisi KIP sudah disampaikan kepada kelompok sasaran yaitu para peserta didik, informasi yang diberikan sudah jelas dan

dapat diterima oleh baik sehingga para penerima dapat memanfaatkan dana sesuai dengan yang diharapkan, dan dari segi konsistensi, para pelaksana mengkomunikasikan sudah secara rutin dilaksanakan baik oleh sekolah maupun dinas.

Edward mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak terdapat sumber daya yang mendukung. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya modal dan sumber daya informasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan, jumlah pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Poncowarno ada 2 yang merupakan operator yang ditunjuk langsung oleh sekolah. Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan, jumlah pengelola di SMP N 1 Poncowarno dirasa kurang. Hal tersebut dikarenakan hampir keseluruhan siswa SMP N 1 Poncowarno mendapatkan bantuan KIP. Jumlah keseluruhan siswa penerima KIP adalah 507 siswa dari jumlah keseluruhan 602 siswa. Dengan hanya dua operator KIP maka pengelola merasa kewalahan dalam mengelolanya karena belum lagi banyaknya kendala-kendala yang terjadi pada peserta didik.

Kelengkapan peralatan yang

menunjang berjalannya pelaksanaan KIP sudah lengkap dan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Peralatan yang dimaksud disini merupakan gedung, komputer dan jaringan internet. Kelengkapan peralatan tersebut di sekolah sangat membantu pengelola dalam melakukan pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan kepada pemerintah pusat. Aplikasi yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu dan mempermudah pelaksanaan juga dapat dioperasikan dengan baik karena adanya komputer dan jaringan internet yang mendukung. Sumber daya modal menentukan pelaksanaan kebijakan KIP. Dana bantuan KIP sepenuhnya dari pemerintah pusat yang dianggarkan melalui dana APBN. Dana tersebut langsung diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui rekening KIP. Dengan keterbatasan dana, maka pemerintah tidak menganggarkan dana untuk para pengelola KIP di sekolah. Sehingga pengelola KIP di sekolah murni hanya dengan membantu para peserta didik untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sumber daya informasi juga sangat menunjang pelaksanaan kebijakan KIP. Informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada dinas daerah sudah lengkap dan jelas kemudian dinas daerah dapat meneruskannya langsung kepada sekolah. Sekolah mendapatkan informasi yang lengkap dari dinas, mereka dapat

dengan mudah menerima informasi yang diberikan. Pada saat sosialisasi yang diadakan oleh dinas, sekolah juga mendapatkan selebaran yang berisi juknis dan mekanisme KIP. Hal tersebut juga mempermudah para pengelola sekolah dalam menyampaikan kepada pihak sasaran yaitu peserta didik. Pemerintah pusat juga menyediakan aplikasi. Di dalam aplikasi tersebut terdapat informasi yang lengkap mengenai KIP.

Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam implementasi kebijakan, disposisi implementator mencakup tiga hal penting yaitu, respon implementator, kognisi dan intensitas disposisi implementator.

Dalam pelaksanaan KIP di SMP N 1 Poncowarno, semua warga sekolah sangat mendukung pelaksanaan KIP. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, operator KIP di SMP N 1 Poncowarno, mereka telah membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan KIP di sekolah. Operator telah melaksanakan sosialisasi kepada peserta didik penerima KIP dan membantu sepenuhnya mulai dari pengajuan hingga pencairan dana tersebut. Tidak sekedar itu, operator sekolah juga memantau siswa dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa operator sangat bertanggung jawab dengan jalannya dan memastikan pelaksanaan implementasi KIP di SMP N 1 Poncowarno berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik, mereka menggunakan dana bantuan yang diberikan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli kuota internet untuk sekolah *online*, perlengkapan sekolah dan membayar SPP. Dengan begitu maka peserta didik bertanggung jawab dengan dan patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan dana KIP dengan tepat.

Struktur birokrasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Dinas Pendidikan Daerah adalah salah satu pelaku kebijakan yang cukup terlibat dan berperan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dinas sepenuhnya membantu sekolah dalam menyampaikan informasi yang didapat dari pemerintah pusat. Koordinator KIP Dinas selalu melakukan sosialisasi, verifikasi dan monitoring berjalannya KIP di sekolah.

Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar

(KIP) di SMP N 1 Poncowarno diserahkan kepada operator yang sudah ditunjuk langsung oleh sekolah. Mereka bertugas sebagai penanggung jawab jalannya KIP di sekolah. Operator melakukan pendataan peserta hingga membantu pencairan dana dan memastikan penggunaan dana oleh peserta didik tepat. Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan perannya masing-masing dan terdapat kerjasama antara personil kebijakan.

Strategi yang dilakukan sekolah dalam implementasi kebijakan KIP dalam upaya mengurangi anak putus sekolah adalah membantu siswa dalam mengumpulkan syarat-syarat, mempermudah siswa dan orang tua dalam pencairan dana, serta mengusulkan seluruh peserta didik yang layak bantuan KIP.

Hakikat implementasi adalah dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut dinyatakan berlaku (Widodo, 2008 : 86). Apabila ditinjau dari tujuan KIP dalam petunjuk teknis KIP, maka dampak yang ditimbulkan adalah bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mampu mengurangi anak putus sekolah. Berdasarkan data wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan, hal tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Faktor anak putus sekolah tidak hanya karena

masalah pembiayaan saja. Terdapat faktor lain yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan lokasi sekolah, serta kurang minatnya peserta didik untuk melanjutkan pendidikan. Bila ditinjau dari penerima KIP, dampak yang ditimbulkan adalah membantu peserta didik dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan meringankan biaya pendidikan.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan KIP di SMP N 1 Poncowarno

Faktor pendukung implementasi kebijakan KIP di SMP N 1 Poncowarno yaitu komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang baik antar pelaksana kebijakan baik dari pemerintah pusat, dinas daerah, dan sekolah. Penyampaian informasi yang jelas dan kerja sama yang baik antar pengelola. Fasilitas sarana dan prasarana yang mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan KIP seperti komputer dan jaringan internet yang mudah diakses.

Faktor Penghambat Implementasi KIP di SMP N 1 Poncowarno

Faktor Penghambat dari implementasi kebijakan KIP di SMP N 1 Poncowarno diantaranya yaitu, kurangnya pengelola KIP di sekolah, operator sekolah kewalahan dalam pengelolaan KIP dengan jumlah penerima yang cukup banyak, kelalaian siswa dalam mempergunakan kartu sehingga terjadi kendala saat pencairan seperti lupa pin kartu hingga

terblokirnya kartu dan masih terdapat penyalahgunaan dana oleh orang tua siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan KIP dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah di SMP N 1 Poncowarno, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan KIP di SMP N 1 Poncowarno dikomunikasikan melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin pada awal semester oleh pihak operator sekolah. Sekolah membantu sepenuhnya pelaksanaan KIP mulai dari pendataan, pemenuhan syarat untuk pengusulan, pengajuan peserta didik hingga pencairan. Sekolah juga memantau penggunaan dana KIP oleh peserta didik guna memastikan dana bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan benar. Dalam aspek sumber daya peralatan yang dimiliki oleh SMP N 1 Poncowarno sudah dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Peralatan dimaksud antara lain adalah komputer dan jaringan internet (*wi-fi*). Operator pengelola Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Poncowarno dirasa masih kurang

karena tidak sebanding dengan peserta didik penerima KIP di sekolah tersebut. Dari aspek modal tidak adanya anggaran khusus untuk pengelola, pemerintah sepenuhnya menganggarkan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari dana APBN untuk para peserta didik penerima KIP.

2. Dampak Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat mengurangi anak putus sekolah, namun tidak dapat maksimal. Hal tersebut karena faktor putus sekolah tidak hanya karena faktor biaya melainkan ada faktor lain seperti faktor keluarga, faktor lingkungan dan lokasi sekolah, serta kurang minatnya peserta didik untuk melanjutkan pendidikan

Faktor pendukung pelaksanaan KIP adalah komunikasi, koordinasi, sosialisasi yang baik antara pelaksana kebijakan, baik dari pemerintah pusat, dinas daerah dan sekolah, penyampaian informasi yang jelas, kerjasama yang baik antar pengelola KIP di sekolah, fasilitas sarana dan prasarana yang mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan KIP seperti komputer dan jaringan internet yang mudah diakses. Faktor penghambat pelaksanaan KIP di SMP N 1 Poncowarno adalah kurangnya tenaga pengelola KIP di sekolah sehingga pengelola yang ada kewalahan,

kelalaian siswa lupa pin dan kartu terblokir sehingga menghambat proses pencairan, penyalahgunaan dana oleh orang tua, dan masih terdapat penerima yang tidak tepat sasaran karena sudah mendapat dari SD.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi KIP dalam upaya mengurangi anak putus sekolah di SMP N 1 Poncowarno masih memerlukan saran yang dapat membangun. Adapun saran tersebut diantaranya:

1. Pemerintah
 - a. Sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi lebih ditingkatkan.
 - b. Diadakannya sosialisasi ataupun bimbingan karakter kepada peserta didik mengenai pentingnya pendidikan untuk membantu meningkatkan minat sekolah pada anak.
 - c. Validitas penerima KIP lebih dipantau lagi. Pemerintah dapat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk bisa ikut turut serta dalam mengambil keputusan mengenai KIP, karena sekolah yang lebih memahami keadaan dilapangan yang sesungguhnya.
2. Sekolah
 - a. Sekolah lebih meningkatkan pengawasan kepada peserta didik dalam pemanfaatan dana.

- b. Perlu ditambahkan tenaga pengelola KIP supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.
- c. Sekolah lebih teliti dalam pendataan untuk pengajuan peserta didik penerima KIP, sehingga tidak ada lagi penerima yang tidak tepat sasaran.

Lebih di tingkatkan dalam memberi informasi mengenai KIP kepada peserta didik.

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Banyumedia Publishing

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Revisi V.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2018). Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/>. Pada tanggal 23 Februari 2020
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. (2018). Diakses dari <https://kebumenkab.bps.go.id/>. Pada tanggal 21 Februari 2020
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud, (2003). Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dewi, NA.K. Zukhri, A.Dunia, I.K. (2014). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerogak Tahun 2012/2013.* Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksa, Vol4 no 1,1-12.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan.* Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian*